Jurnal Bisnis
Volume 7 Nomor 1 – Oktober Tahun 2019
ISSN: 2338 -0411

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014-2018)

Rita Yunita Resmi
Program Studi S1 Akuntansi STIEB Perdana Mandiri
rita@stieb-perdanamandiri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui studi kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer dan sekunder melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 54 responden. Metode analisis statistik yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana dengan menggunakan *software* SPSS versi 25,0.

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terbukti dari nilai t hitung sebesar 11,546, sedangkan t tabel 2,007. Oleh karena itu t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku perusahaan. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*Stakeholder*). Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu dari sisi pemakai internal dan dari sisi pemakai eksternal Mahmudi (2010:02).

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Tujuan laporan keuangan menurut Standar akuntansi Pemerintah (SAP) adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Menurut Mahmudi (2010:11), "Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami".

Hal penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pegelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (www.bpk.go.id) terdapat kelemahan sistem pengendalian internal di Kabupaten Purwakarta yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Purwakarta, antara lain:1) Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum optimal, terdapat reklame yang belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan belum dipungut pajak reklame; 2) Penagihan pajak hotel dan restoran belum optimal, potensi retribusi dari menara telekomunikasi belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) tidak dapat segera dimanfaatkan; 3)Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari penyewaan gedung dan bangunan belum optimal, dan pendapatan sewa bagi hasil dengan pihak ketiga belum diverifikasi.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Purwakarta masih memiliki kekurangan untuk menghasilkan laporan keuangan karena masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 Tahun 2008).

Sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, reabilitas penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang serta kebijakan yang berlaku. Mahmudi (2010:20) menyatakan bahwa tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).
5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2010:12), “laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan dalam PSAP 01, “laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan”.

Mahmudi (2010:4) secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Penerapan pengendalian internal yang memadai dapat mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Menurut Dadang Suwanda (2013:2) Dengan sistem pengendalian internal tersebut diharapkan dapat mencapai tujuannya, yaitu dengan adanya laporan keuangan yang andal, kegiatan yang efisiensi dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terciptanya tujuan pengendalian tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat mendorong terciptanya pencegahan terhadap kegagalan dan percepatan dalam pencapaian keberhasilan tujuan pemerintah daerah.

Penjabaran terkait sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan disimpulkan beberapa hal. Pertama, penerapan sistem pengendalian dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan. Kedua, penerapan sistem pengendalian yang memadai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta tercapainya tujuan instansi pemerintah. Berikut ini skema kerangka pemikiran dalam penelitian:

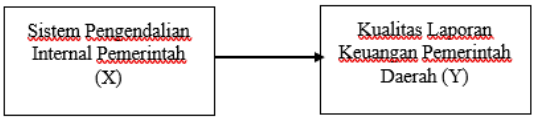

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto, objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel, objek penelitian ditemukan melekat pada subjek penelitian". Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disini merupakan variabel bebas (X) sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan variabel terikat (Y).

Tabel II.1
Operasional Variabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No item
1	Sistem pengendalian internal pemerintah (X)	1. Lingkungan Pengendalian	1. Penegakan integritas dan nilai etika	Ordinal	1
			2. Komitmen terhadap kompetensi		2 - 3
			3. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan		4
			4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;		5
			5. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.		6
			6. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.		7
		2. Penilaian risiko	1. Identifikasi terhadap risiko yang mungkin terjadi	Ordinal	8 - 11
		3. Kegiatan pengendalian	1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.	Ordinal	12
			2. Pengendalian fisik atas aset		13
			3. Pemisahan fungsi.		14
			4. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.		15
			5. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.		16
			6. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.		17

			7. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.		18
		4. Informasi dan komunikasi	1. Informasi dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan. 2. Melakukan kegiatan komunikasi. 3. Informasi dilaporkan dengan tepat waktu. 4. Menerapkan sistem informasi yang mendukung operasional harian.	Ordinal	19 20 21 22
		5. Pemantauan Sumber: Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	1. Melakuan kegiatan pemantauan secara berkala. 2. Tindak lanjut atas hasil audit. 3. Pemeriksaan ulang terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 4. Dokumentasi atas hasil pemantauan	Ordinal	23 24 25 26
2.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Relevan	1. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan dan kinerja di masa datang. 2. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu. 3. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu.	Ordinal	1 2 - 3 4 - 5
		2. Andal	1. Laporan keuangan disajikan secara secara jujur. 2. Laporan keuangan dapat diverivikasi kebenarannya. melalui proses audit laporan keuangan 3. Laporan keuangan disajikan secara netral	Ordinal	6 7 8 - 9
		3.Dapat dibandingkan	1. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.	Ordinal	10 - 11

		4. Dapat dipahami	1. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhan dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.	Ordinal	12 - 13

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan hasilnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, penulis juga melakukan analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.0. Hasil dari perhitungan diatas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat hubungan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nilai *pearson correlation* Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,848 yang berada pada tingkat hubungan sangat kuat karena berada di interval 0,71 – 0,90 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah sangat kuat.

Dari hasil persamaan regresi nilai persamaannya adalah Y = 10,748 + 0,424X. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertambah 1 maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,424.

Berdasarkan hasil uji signifikan parameter individual (uji-t) , nilai t_{hitung} sebesar 11,546 dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,007. Nilai t_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi t dengan tingkat kesalahan 5% uji 2 pihak dan df = n-2, yaitu 54 - 2 = 52 sebesar 2,007. Berdasarkan hasil *output* SPSS versi 25.0 t_{hitung} sebesar 11,546 > t_{tabel} 2,007 maka Ho ditolak artinya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan hipotesis penulis terbukti.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) besarnya angka koefisien determinasi atau R Square antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 0,719 atau sama dengan 71,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 71,9%. Sedangkan sisanya (100% - 71,9% = 28,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengolahan SPSS versi 25.0 nilai uji t untuk

variabel sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan nilai t_{hitung} > t_{tabel} sebesar 11,546 > 2,007. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik dan meningkat sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik dan meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya.

Bagi perusahaan:

1. Sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta lebih mengoptimalkan sistem pengendalian internal pemerintah. Optimalisasi sistem pengendalian internal pemerintah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
2. Sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun atau merevisi kebijakan yang akan ditetapkan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerimaan secara lebih optimal.

Bagi Peneliti Selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator, metode yang sama tetapi populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen karena dalam penelitian ini hanya memasukkan satu variabel independen yaitu sistem pengendalian internal pemerintah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian dengan cara menambah tahun penelitian.

V. REFERENSI

Budiawan, Desiana Anugrah. (2014). *"Pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah".* 2 .(1). 276-288.

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim Abdul, Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta Selatan:Salemba Empat.

Herawati, tuti. (2014). *"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan".* XI.(1). 1-14. 1693-4482.

Hery. 2016. *Analisis Laporan keuangan.* Jakarta:PT Grasindo.

Kariyoto. 2017. Analisa Laporan Keuangan. Malang:UB Media.

Karsana, I Wayan dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. (2017). "*Pengaruh efektivitas penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern pada kualitas Laporan Keuangan".* 21.(1). 643-670. 2302-8556.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moha, Febriyani. Lintje Kalangi dan Jessy D.L Warongan. (2017). "*Pengaruh sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan".* 5.(2). 1359-1370. 2303-1174.

Nagor, Teuku fahrian. Dr.Darwanis,M Si,Ak dan Dr. Syukriy Abdullah, SE,M.Si, Ak. (2015). *"Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".* 4.(1). 72-78. 2302-0164.

Nurillah, As Syifa dan Dul Muid. (2014). *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".* 3.(2). 1-13. 2337-3806.

Setiawan, I Wayan Nico dan Gayatri. (2017). *"Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan".* 21.(1). 671-700. 2302-8556.

Shintia, cok dan Ni Made Adi Erawati. (2017). "*Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan*". 21.(2).1.186-1.205. 2302-8556.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&A*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Widari, Liziana dan Sutrisno. (2017). *"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah".* 16.(2). 1290-1318. 23